

PROSES DEMOKRASI DESA DAN STRATEGI PEMENANGAN BERBASIS BUDAYA JAWA DI PILKADES DESA TANJUNG KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI

Endik Hidayat, Miskan
Universitas Wijaya Putra
endikhidayat@uwp.ac.id

Abstract

Implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, regulating the election of village heads simultaneously. In contrast to most post-reform studies in 1998 which analyzed village head election with a material approach or money politics. Instead this study elaborates on political strategy from the perspective of Javanese culture in village political contestation. The study begins identifying who the candidates who fought in Tanjung village head election, the extent to which a cultural approach through the idea of Javanese power effectively won the election of village heads so that research could add a variety of political strategy models to village head election and become role models in rural democracy. With qualitative methods and take case studies of Tanjung village, Pagu District, Kediri Regency. The study identified who were the candidates who fought in Pilkades Tanjung village, and the extent to which spiritual resources through the idea of Javanese power and material resources effectively won the village heads election. This study concluded that all candidates for Tanjung village head using a Javanese culture-based political strategy originated from a source of spiritual power whose variation was divided into six categories: first, the *Slametan* ceremony at the tomb of the village founder. Secondly, *pitou* services come from *kiai* and *dukun*. Third, ownership of heirlooms. Fourth, *pulung* as a sign of power. Fifth, *petungan* to the Java calendar system. Sixth, *luri* lineage village head

Keywords: Java Power, Contestant, Democracy, "Pilkades"

I. PENDAHULUAN

Proses demokratisasi di Indonesia tahun 1998 telah merubah iklim politik nasional cenderung otoriter, perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional pada akhirnya berimbang pada perubahan politik di tingkat pedesaan. Motif yang mendorong penelitian ini untuk mendapatkan suatu bentuk analisa dalam rangka mempelajari pertarungan politik elit desa dalam pemilihan kepala desa. Jika benar tesis bahwa politik uang mempunyai peranan yang dominan dan sangat menentukan dalam pesta demokrasi di pedesaan. Maka bagaimana dinamika politik di desa? Serta sumberdaya kekuasaan yang dimilikinya setiap kandidat kepala desa bertarung dalam Pilkades? Lebih khusus lagi, sejauh mana strategi penggunaan uang dan barang dalam proses pemilihan kepala desa serentak sangat efektif meraup suara masyarakat desa dibandingkan dengan model strategi simbol-simbol kekuasaan Jawa sehingga kajian ini juga melihat perkembangan terkini tentang model kualitas demokrasi masyarakat desa.

Partisipasi politik masyarakat desa setelah reformasi, ditandai meningkatnya minat masyarakat untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa dan pembuatan keputusan desa. Unsur masyarakat yang berperan dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades) setelah reformasi ditandai munculnya berbagai macam variasi elit yang berpengaruh di politik pedesaan. Secara sederhana elit desa bisa diartikan sebagai seseorang yang menduduki semacam "*high social status*" yang berbeda dan membedakan dari masyarakat desa kebanyakan. Salah satunya elit desa yang muncul setelah reformasi adalah elit BPD, yakni akibat perubahan struktur perwakilan masyarakat desa dari yang bersifat korporatis melalui Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersifat partisipatif sejak Undang- Undang No. 22 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur mengenai pelaksanaan Pilkades secara serentak, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kediri memastikan pelaksanaan Pilkades serentak tetap pada Rabu, 28 Desember 2016. Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkades. Selain itu, ada pula landasan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan perdanya. Desa Tanjung yang menjadi lokasi studi ini termasuk desa dengan karakter budaya Jawa sehingga masyarakat desa Tanjung masih memegang tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

Namun, Pilkades di desa Tanjung telah menjadi medan praktik demokrasi berbiaya tinggi (*high cost democracy*) yang bertaburan uang dan sembako bagi para warga desa. Keterlibatan pengusaha dalam kontestasi Pilkades Tanjung terlihat terutama dalam pembiayaan sosialisasi, kampanye, dan berbagai upaya dalam menarik dukungan warga desa kepada pengusaha tersebut jika maju langsung sebagai calon kepala desa atau calon lain yang didukungnya. Sejumlah kalangan setempat mengakui, tanpa keterlibatan elit ekonomi dan dukungan modal kapital, dirasa sulit bagi calon-calon kepala desa untuk mendapat dukungan warga desa. Karena sumber ekonomi berupa hak atas tanah bengkok, dana desa, dan jabatan pamong desa, yang menjadi otoritas kepala desa terpilih menjadi faktor pendorong untuk memenangi kepala desa.

Meskipun Pilkades Tanjung diwarnai maraknya praktik politik uang, ada fenomena menarik yakni berdasarkan informasi awal hampir semua calon kepala desa yang bertarung dalam kontestasi pilkades Tanjung, mengerahkan ilmu gaib atau menggunakan ilmu hikmah yang mereka miliki, atau setidaknya menyimpan pusaka, jimat, dukun, dan ziarah kubur (*pesarean*). Beberapa calon kepala desa juga meyakini dapat wahyu atau *pulung*, untuk membantu tercapainya kemenangan dalam pemilihan kepala desa. Tampaknya pendekatan budaya Jawa masih dianggap oleh calon kepala desa cukup berpengaruh khususnya bagi warga desa Tanjung. Indikasinya adalah, masih banyak keluarga-keluarga yang meletakan sesajen dalam rumah pada hari Jumat Kliwon, melakukan berbagai selamatan dalam menghormati seseorang yang telah meninggal, percaya pada roh-roh halus, dan saat dilakukan kegiatan bersih desa, mayoritas warga ikut berpartisipasi dengan libur bekerja.

Maraknya strategi pemenangan penggunaan politik uang (*money politics*) dapat ditemukan di desa ini, praktek *money politic* berkisar mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu disebar ke warga desa untuk memenangkan pemilihan kepala desa serentak tanggal 28 Desember 2016. Tetapi, terdapat fenomena cukup menarik terkait politik uang, yaitu calon kepala desa Agus dan Rudi mampu memberikan *sangu* atau politik uang cukup besar ternyata kalah. Pemenang Pilkades Vito justru

mampu memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa walaupun tidak mengandalkan faktor modal uang, Vito hanya mampu memberikan tiga puluh ribu dari patungan para kader dan keluarga. Warga desa lebih melihat figur "*laku*" pada pemilihan kepala desa di desa Tanjung. Berdasarkan pengakuan Vito kepala desa terpilih dari desa Tanjung, justru menerapkan strategi berbasis kekuasaan Jawa, meliputi *laku*, *tapabhrata*, dan benda-benda pusaka. Hal ini terbukti efektif memenangkan pemilihan kepala desa Tanjung.

II. LANDASAN TEORI

Demokrasi Desa

Proses demokratisasi desa sesungguhnya telah ditulis dalam bentuk kajian sejak lama. Pandangan teoritik desa menjadi obyek penelitian yang di kaji dari berbagai perspektif dan fokus yang berbeda. Berikut ini dapat diklasifikasikan beberapa hasil penelitian tentang proses demokrasi desa menjadi lima kategori. **Pertama**, pandangan teoritik menekankan hubungan desa dan negara. Bambang Kuncoro (2014) fokus kepada relasi kekuasaan kepala desa dan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pasca orde baru. Relasi kekuasaan kepala desa dengan negara (camat dan bupati) dalam hal penyediaan dana APBD, kontrol dan koordinasi menunjukkan hierarkis administratif (koordinasi) sebagai alat kontrol untuk mengendalikan desa melalui pemberian sarana prasarana dan sumber dana cenderung transaksional. **Kedua**, menekankan pada aspek relasi kekuasaan antara kepala desa dan Badan Permusyawarath Desa (BPD). Heru Cahyono (2005), fokus konflik elit politik di pedesaan antara BPD dan Pemerintahan Desa. Kesimpulan bahwa proses pembentukan BPD yang tidak demokratis akan meningkatkan kecenderungan terjadinya konflik elit di tingkat desa, serta politisasi elit BPD telah mengurangi efektivitas lembaga tersebut dalam melaksanakan kontrol obyektif terhadap pemerintahan desa. Selanjutnya isu-isu yang bermunculan di sekitar konflik dirumuskan atau digodok oleh kalangan elit politik dan tanpa menyertakan keterlibatan masyarakat, sehingga kerap kali isu-isu kurang menyentuh persoalan-persoalan krusial yang ada dalam masyarakat pedesaan.

Ketiga, studi yang menfokuskan kepada aspek perubahan elit dan pembuatan kebijakan desa. Elizabeth Tambunan (2007), fokus peran kelompok agama dalam politik lokal mulai berkurang sementara kelompok wiraswasta mulai berperan signifikan. Perubahan elit lokal dapat terjadi bukan hanya karena faktor sumber kekuasaan yang dimiliki elit lokal tetapi karena adanya kebutuhan desa untuk meningkatkan pendapatan desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pasca dilaksanakan kebijakan pemekaran daerah otonom. **Keempat**, tentang orang kuat lokal dan jaringan sosial pedesaan. Perspektif Yanwar Pribadi (2015), memusatkan studi orang kuat lokal yakni, kepada kepala desa (lurah atau *klebun*), kiai, dan jawara atau disebut *blater* di Madura. Hubungan antara tokoh agama, orang kuat lokal, dan pejabat desa sangat kompleks yaitu berpijak peluang keuntungan materi pribadi, persaingan politik yang bersifat cair, transaksional, dan saling menguntungkan.

Kelima, studi yang memfokuskan pemilihan di desa atau kontestasi politik di pedesaan. Neneng Yuningsih (2016), ketiga desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern. Terdapat pengaruh elit desa yang disebut sesupuh desa dalam seleksi bakal calon kepala desa masih sangat kuat. Selain itu, tingginya tingkat persaingan yang menimbulkan situasi kampanye dengan penggunaan politik uang membuka situasi masuknya kekuatan lain yang memberi modal kepada calon kepala

desa untuk memenangkan pemilihan. Edward Apinal dan Noor Rohman (2017) meyimpulkan fenomena "*money politic*" menunjukkan bahwa pembelian suara lebih intensif dalam pemilihan kepala desa daripada pemilu lainnya. Sebagian besar kepala desa adalah calo (*brokerage*) pemilih yang handal (*vote getter*) dan, di seluruh Indonesia. Berbeda dengan studi-studi lima fokus diatas, kajian ini lebih fokus model demokrasi dan strategi politik berbasis budaya Jawa saat bertarung pada pesta demokrasi desa (Pilkades). Kebaruan lain dari studi ini pada aspek penggunaan teoritik kekuasaan Jawa. Siapa saja kandidat bertarung di Pilkades dan sejauh mana praktik simbolisasi kekuasaan Jawa yang digunakan untuk menjalankan kepentingan dalam ajang pemilihan kepala desa. Selain itu penelitian juga mengungkap dampak politik uang (*money politic*) terhadap kualitas demokrasi. Karena kajian tentang desa yang berbasis budaya Jawa yang dipahami oleh pemimpin maupun masyarakat desa saat Pilkades masih belum banyak dilakukan atau bahkan belum ada sama sekali.

Strategi Politik

Salah satu wujud dari demokratisasi di tingkat lokal adalah melalui pemilihan kepala desa. Dalam konteks ini, strategi politik diartikan sebagai pendekatan secara menyeluruh yang akan diterapkan dalam kampanye. Suatu usaha untuk memenangkan pertarungan politik, maka strategi merebut dukungan rakyat dalam pemilihan umum mutlak dibutuhkan mulai tingkat paling bawah desa sampai kepada skala nasional. Bidang politik adalah salah-satu entitas yang tidak bisa menghindari transformasi konsep strategi. Politik memerlukan kepemimpinan pada kelompok besar masyarakat atau kepartaihan menuju arah sasaran khusus yang sering dianggap sebagai tujuan politik.

Maurice Duverger (2014) menjelaskan bahwa pertempuran politik terkait dengan pertempuran-pertempuran yang kompleks, setiap orang berlaku sesuai dengan rencana yang dipahami terlebih dahulu, dimana setiap orang membuat antisipasi serangan-serangan lawan politik, jawaban-jawaban atas serangan lawan, serta alat-alat untuk menyelesaiannya. Rencana perjuangan ini merupakan strategi dan unsur-unsur yang ada didalamnya merupakan taktik. Lebih lanjut Carl Von Clausewitz, terdapat perbedaan antara taktik dan strategi. Taktik merupakan seni menggunakan kekuatan bersenjata untuk memenangkan pertempuran. Kemenangan dalam pertempuran dengan desain jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian merupakan tahap yang disebut dengan strategi. Taktik adalah bagian dari strategi yang bersifat jangka pendek, sedangkan strategi adalah bagian dari keseluruhan perencanaan yang dibuat. Penetapan strategi dalam kampanye politik merupakan hal yang penting, sebab jika penerapan strategi gagal akan terjadi kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Karena strategi politik ialah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Selengkapnya Schroder (2010) berpendapat bahwa:

Strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita. Sebuah bentuk strategi yang khusus adalah strategi pemilihan umum yang diutamakan demi memperoleh kekuasaan yang sebanyak mungkin pengaruh dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, sehingga politik dapat mewujudkan suatu perubahan dalam masyarakat dapat dicapai.

Sedangkan pengertian strategi kampanye menurut Peter Schroder (2010) adalah;

Strategi kampanye adalah bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat.

Salah satu jenis kampanye politik adalah kampanye terbuka, yaitu kampanye politik yang ditujukan kepada massa (orang banyak), baik melalui hubungan tatap muka konvoi di jalan-jalan maupun dengan menggunakan berbagai media, seperti surat kabar, radio, televisi, film, spanduk, baliho, poster, dan selebaran serta medium interaktif melalui komputer (internet). Kampanye politik saat ini sudah mengadopsi prinsip-prinsip pemasaran dan pembentukan citra. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena sistematika pemilu menggunakan sistem pemilihan secara langsung. Pada umumnya strategi pemenangan dalam konteks pemilihan kepala desa berupa kombinasi antara kampanye terbuka dan kampanye terselubung, yang dimaksud kampanye terselubung adalah pemberi uang, pemberian barang, serta peluang ekonomi (terkait dengan tanah bengkok) bagi para calon pemilih dan tim sukses yang mendukung kandidat kepala desa bertarung di Pilkades. Pemberian uang yang dimaksudkan disini adalah pemberian uang pada saat pemilihan atau beberapa hari sebelumnya, serta pemberian uang untuk transportasi masyarakat desa yang memilih (*sangu*).

Kekuasaan Jawa

Kebudayaan Jawa tidak mengenal konsep kekuasaan seperti yang dipahami dan digunakan di Barat. Seperti diungkapkan Anderson dalam menjelaskan konsep kekuasaan Jawa, Anderson mengkontraskan dengan konsep kekuasaan Barat berdasarkan beberapa kriteria, yaitu abstrak tidaknya kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, jumlah kekuasaan, dan moralitas kekuasaan. Karakteristik kekuasaan Jawa (*kesakten*) sangat bertolak belakang dengan kekuasaan Barat. *Pertama*, menurut Anderson (2000) kekuasaan itu konkret. Bagi orang Jawa, kekuasaan itu ada, terlepas dari orang yang mungkin mempergunakannya. Kekuasaan bukan suatu anggapan teoritis, melainkan suatu realitas yang benar-benar ada. Kekuasaan adalah daya yang tidak bisa diraba, penuh misteri, dan bersifat ketuhanan yang menghidupkan alam semesta. Kekuasaan terwujud dalam setiap aspek dunia alami, pada batu, kayu, awan, dan api. *Kedua*, menurut Anderson kekuasaan itu homogen. Dari konsepsi ini timbul pendapat bahwa semua kekuasaan itu sama jenisnya dan sama pula sumbernya. Kekuasaan di tangan satu individu atau satu kelompok adalah identik dengan kekuasaan yang ada di tangan individu atau kelompok lain manapun. *Ketiga*, menurut Anderson pandangan orang Jawa, alam semesta tidak bertambah luas dan tidak pula bertambah sempit. Demikian pula jumlah kekuasaan yang terdapat di dalamnya selalu tetap. *Keempat*, kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahannya. Karena semua kekuasaan berasal dari sumber tunggal yang homogen, maka kekuasaan itu sendiri lebih dahulu ada daripada masalah-masalah baik-buruk. Menurut cara pemikiran orang Jawa, menuntut hak berkuasa berdasarkan sumber-sumber kekuasaan yang berbeda-beda tidak akan ada artinya. Bagi orang Jawa itu tidak relevan dipertanyakan. Sebab, "kekuasaan tidak absah dan bukan pula tidak absah. Yang penting kekuasaan itu ada".

Sementara pemanfaatan simbol kekuasaan Jawa dalam kontestasi demokrasi dielaborasi oleh Pajar Hatma Indra (2013). Dalam kasus pemilihan

dukuh di desa Mulyodadi tahun 2008, cara-cara non-rasional masih digunakan untuk memenangkan kompetisi. Salah satu calon mengurung dan menjaga ayam cermani agar tidak lepas dari kandang atau mati sampai pemungutan suara selesai. Bahkan salah satu calon pemilihan kepala desa yang masih keluarga peneliti di Kulonprogo “mendatangkan” kiai dari Jawa Timur untuk melindungi dari gangguan gaib dari calon lain. Menurut cerita, sang calon diminta mandi di sungai dan menanam kain mori di sekeliling rumah agar terbebas dari serangan gaib lawan. Selain simbol-simbol yang berasal dari konsep kekuasaan Jawa, hampir semua calon muslim yang mengikuti pemilu di malam hari mengadakan pengajian dan tahlilan. Sebagai seorang muslim mereka percaya bahwa hanya kuasa tuhanlah yang mampu membuat orang menduduki posisi tertentu. Menurut Pajar Hatma Indra (2013) dengan demikian cara-cara non rasional instrumental masih dipraktekan di Yogyakarta dengan pemaknaan berbeda-beda.

Di tengah sistem demokrasi, ternyata gagasan kekuasaan Jawa tidak hilang begitu saja dalam cadangan pengetahuan masyarakat sehingga masih banyak digunakan sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat. Beberapa kontestan politik mulai tingkat desa sampai nasional, yang bersaing dalam arena demokrasi menggunakan istruumen-instrumen terkait dengan konsep kekuasaan Jawa (monarki Jawa) untuk berkontestasi dalam sistem demokrasi. Di samping cara-cara di atas, masih ada yang lain, yaitu mengumpulkan berbagai benda pusaka; seperti keris, gamelan, kereta kencana, payung kebesaran, dan barang pusaka lainnya dan bahkan orang yang dipandang memiliki kelebihan berupa *kesakten* dalam perpektif budaya Jawa.

III. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengambil studi kasus pada pemilihan kepala desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur.. Studi ini bersifat diskriptif analisis, bertujuan memberi gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan teknik data deskriptif sebagaimana digambarkan tersebut adalah teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara mendalam telah peneliti lakukan setelah Pilkades serentak di Kabupaten Kediri 28 Desember 2016. Strategi wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa informan sebagai subjek penelitian utama, yaitu para calon kepala desa yang berkompetisi dalam Pilkades. Informan yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak tiga orang yang merupakan pihak berkepentingan di pemilihan kepala desa Tanjung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diantara kumpulan studi-studi maraknya budaya politik uang dalam Pilkades (Kartodirdjo 1992; Yuniningsih 2016; Syaeful Bahar 2017; Aspinall dan Rohman 2017). Sebaliknya, studi ini menemukan ada fenomena menarik, yang merupakan antitesa kumpulan studi sebelumnya. Karena selain menggunakan politik uang, berdasarkan informasi awal hampir semua calon kepala desa yang bertarung dalam kontestasi pilkades Tanjung, juga menggunakan sumber kekuasaan Jawa bersifat kekuasaan spiritual. Oleh karena itu, semua calon kepala desa mengerahkan ilmu gaib atau menggunakan ilmu hikmah yang mereka miliki, atau setidaknya menyimpan pusaka, jimat, dukun, dan ziarah kubur (*pesarean*). Bahkan semua calon

kepala desa Tanjung juga meyakini dapat wahyu atau *pulung*, untuk membantu tercapainya kemenangan dalam pemilihan kepala desa. Hal itu membuktikan strategi politik berbasis budaya Jawa masih populer kalangan calon kepala desa dan berpengaruh khususnya bagi warga desa Tanjung. Dari persektif budaya desa Tanjung, masih banyak keluarga-keluarga yang meletakan sesaji dalam rumah pada hari Jumat Kliwon, melakukan berbagai selamatan dalam menghormati seseorang yang telah meninggal, percaya pada roh-roh halus. misalnya, saat melakukan kegiatan bersih desa, mayoritas warga ikut berpartisipasi dengan libur bekerja.

Peristiwa Pilkades Tanjung menjelaskan proses bertahannya simbol-simbol kekuasaan Jawa dalam praktik demokrasi modern tingkat lokal. Lantas, apakah dukungan masyarakat desa terhadap calon kepala desa saat Pilkades hanya bertumpu legitimasi kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual? Karena saat pemilihan kepala desa Tanjung yang lalu, masih banyak ditemukan indikasi penggunaan sumber kekuasaan Jawa ‘kesakten’ melalui simbol-simbol kekuasaan Jawa yang bersifat *spiritual power*. Apakah penggunaan sumber kekuasaan Jawa dominan di Pilkades Tanjung? Lebih khusus lagi, bagaimana bentuk strategi politik berbasis sumber kekuasaan Jawa? Selanjutnya, pembahasan variasi strategi berbasis kekuasaan Jawa dalam Pilkades Tanjung seperti diuraikan ditas adalah sebagai berikut:

Slametan Di Makam Pendiri Desa

Slametan memperlihatkan hasrat mencari keselamatan dalam dunia yang kacau. Kegiatan ini bertujuan bagi sebuah kehidupan yang lebih baik, kini maupun di masa mendatang, tetapi lebih spesifik untuk memelihara tatanan dan mencegah datangnya musibah atau bala. Juga terlihat, bagaimanapun, bahwa manusia memegang peran aktif dalam memelihara tatanan ini dan mampu mempengaruhi arahnya, hubungan sosial yang tertata baik menjadi sebuah sarana menuju – dan sebuah kondisi untuk meningkatkan – keadaan *slamet* (Niels Mulder 2001, 98). Semua calon kepala desa Tanjung percaya apabila tradisi *slametan* tidak dilakukan menjelang peristiwa penting seperti Pilkades, maka akan terjadi musibah atau *bala*, sehingga tidak ada orang yang berani untuk menghentikan tradisi itu. Tujuan adalah agar pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar, dan masyarakat desa tidak berkonflik berkepanjangan setelah peristiwa penting tersebut. Sehingga keharmonisan kehidupan di desa tetap terjaga.

Terdapat keyakinan sebagai calon pemimpin desa, harus menghormati roh pelindung desa ‘*danyang*’ sebagai pendiri desa. Sehingga kegiatan *slametan* tersebut pelaksanaannya bertempat keramat “*punden*” atau tempat makam sesepuh desa. Desa Tanjung terdapat tiga *punden* tersebar di dua dusun yang dijadikan tempat acara *slametan* sebelum pemilihan kepala desa Tanjung tahun 2016 kemarin. Misalnya, *danyang* pertama disebut warga desa dengan “Mbah Prabu Anom Pangeran Pakpak” di dusun Balekembang, serta di dusun Tanjung terdapat dua *danyang* yang disebut warga desa yakni Mbah Wonokarso dan Mbah Ageng Gindho (Wawancara dengan Vito, 9 Desember 2015). Praktik *slametan* tersebut identik dengan pemikiran kekuasaan Jawa karya Anderson (Magnis Suzeno 2003, 104). Apabila seorang sudah menjadi raja ia akan berusaha untuk terus memperbesar kekuasaannya. Demi tujuan itu ia akan mengumpulkan semua potensi magis yang terdapat dalam wilayah kekuasaannya. Yakni secara teratur raja mengunjungi candi-candi dan tempat-tempat ziarah dalam kerajaannya, terutama makam-makam raja

dahulu. Dengan mengunjungi mereka raja yang hidup mewarisi kekuasaan adikodrati mereka.

Motivasi calon kepala desa melakukan kegiatan *slametan* di makam pendiri desa adalah *ngalap barokah*¹, untuk mendapatkan sesuatu sumber kekuasaan spiritual dalam tradisi Jawa. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan politiknya untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Sedangkan *slamet* mengandung pengertian keselamatan dari kemungkinan adanya rintangan dan terhindar dari gangguan gaib (kekuatan tidak kasat mata dan cenderung menggunakan kekuatan mistik), kemunculan gangguan itu mungkin akibat persaingan di medan Pilkades oleh lawan-lawan politiknya. Karena makam pendiri desa atau *punden*, bagi sebagian masyarakat desa percaya bukan sekedar tempat menyimpan makam, tetapi adalah tempat keramat karena di sana dikebumikan jasad orang kharismatik. Jasad orang Keramat itu tidak sebagaimana jasad kebanyakan orang, karena terdapat keyakinan bahwa jasadnya tidak akan hancur dimakan oleh binatang tanah dan terjaga oleh kekuatan magis yang tetap dimilikinya meskipun orang tersebut sudah lama meninggal.

Kegiatan selamatan menjelang Pilkades diatas, menurut Geertz (1981, 13-14) menyebutnya *slametan "selingan"* yakni *slametan* yang diadakan sekali-kali untuk suatu peristiwa atau maksud khusus yang tidak secara khas berulang kembali pada rangkaian jarak waktu tertentu. Pada saat menjelang pemilihan kepala desa kemarin banyak calon kepala desa Tanjung juga melaksanakan *slametan* yang sifatnya selingan. Setiap calon kepala desa melakukan *slametan* selingan menjelang hari pemilihan adalah untuk praktik sumber kekuasaan budaya Jawa. Suatu tradisi dari nenek moyang merupakan bentuk kearifan lokal kebudayaan Indonesia. Selain itu, tradisi tersebut dilakukan calon kepala desa sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan, dan merupakan pengharapan agar saat pemilihan kepala desa ke depan menjadi pemenang.

Jasa *Pituo* Dari Kiai Dan Dukun

Pituo dalam bahasa Jawa berarti orang tua, atau orang sepuh yang sangat terhormat. Para *pitou* ini bisa berasal dari para kiai dan dukun Jawa. *Pituo* memiliki pengaruh di masyarakat desa karena dianggap memiliki *magi*. Masyarakat desa ada yang meyakini bahwa *magi* merupakan sebuah kekuatan yang dipercaya dapat membawa keuntungan konkret dalam kehidupan keseharian. Malinowski (Lili Romli 2007, 96-97) mendefinisikan *magi* sebagai pengetahuan palsu (*false science*). Sedangkan Frazer menyebutnya sebagai upaya manipulasi kekuatan supranatural untuk memenuhi kebutuhan praktis manusia, apabila kebutuhan praktis manusia itu tidak bisa diperoleh melalui pengetahuan biasa. Kemampuan *magi* memenuhi kebutuhan praktis manusia karena dalam *magi* itu secara teoritis ada formula-formula, resep-resep, dan cara-cara/rumus-rumus tertentu untuk memanipulasi kekuatan supranatural yang akan dipergunakan oleh manusia.

Walaupun sama-sama dianggap memiliki kekuatan magis. Namun, yang membedakan antara kiai dan dukun adalah tata cara ritual misalnya; pengobatan yang dilakukan. Misalnya proses ritual penyembuhan yang dilakukan oleh kiai selalu diiringi doa-doa dan berdasarkan keyakinan bahwa kesembuhan hanya karena

¹ Istilah dalam bahasa Jawa yang terkait dengan arti sesuatu perolehan kekuatan yang mistis dan menjadikan orang yang menerimanya sebagai orang yang mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dari para ulama, sesepuh, dan nenek moyang yang deajat kesalehannya sangat tinggi.

takdir dan ketentuan Allah. Lantas semua usaha, harapan dan doa-doa selalu hanya ditujukan kepada Allah. Sedangkan untuk tata cara ritual yang dilakukan dukun Jawa tidak selalu diiringi kalimat doa-doa yang identik dengan tata cara dalam peribadatan agama Islam. Karena begitu variatif kemampuan para dukun, maka pengaruh dukun di masyarakat Kediri yang didominasi daerah pedesaan menjadi cukup strategis. Misalnya, dalam kontestasi Pilkades pengaruh ini bisa mengalahkan elit desa lainnya. Berbagai model *pituo* (kiai dan dukun) menjadi sebagai penasehat spiritual calon kepala desa, supaya dapat mempengaruhi preferensi politik masyarakat desa untuk mencoblos calon yang menggunakan jasa dukun tersebut (Wawancara dengan Widi, 17 Agustus 2017).

Berdasarkan uraian diatas *Pituo* adalah orang yang dianggap sakti, jika ditinjau dari perspektif kekuasaan Jawa orang-orang sakti tersebut harus mendukung dan berada di sekitar penguasa. Konsep Anderson (1972) tentang sumber kekuasaan homogen, yang menganggap bahwa semua orang-orang memiliki kekuatan tertentu dan dianggap mempunyai kekuatan gaib harus berada di dekat penguasa atau raja. Oleh karena itu, kekuatan spiritual yang dimiliki penguasa teraktualisasi dalam bentuk sokongan orang-orang mempunyai kesaktian dalam memperkuat kekuasaan raja. kepala desa dapat juga sebagai penguasa atau raja kecil di desa. Ketika kontestasi pemilihan kepala desa, semua calon akan berusaha bertarung mendapat kekuasaan sebagai penguasa desa. Demi tujuan itu mereka akan mengumpulkan semua potensi magis yang terdapat di daerahnya. Calon kepala desa harus dikelilingi oleh manusia-manusia yang dianggap keramat atau *pituo*, menarik dukun-dukun dan kiai-kiai termashur di tempatnya. Semua usaha tersebut dilakukan agar bisa memenangkan pemilihan kepala desa dan memperkuat kepercayaan diri berupa sumber kekuasaan yang bersifat spiritual dalam perspektif kekuasaan Jawa

Benda-Benda Pusaka

Berbagai sumber kekuasaan Jawa meliputi *slametan* di tempat sakral dan manusia-manusia pilihan yang mempunyai kesaktian, sebagai upaya mendukung kekuasaan seorang penguasa desa. Sumber kekuatan spiritual terdapat juga dalam berbagai benda-benda pusaka. Calon kepala desa mengetahui bahwa barang-barang pusaka seperti; keris, tombak, payung kecil, *wesi aji* (lempengan besi kuning), dan pedang mempunyai kekuatan spiritual yang dapat menambah aura kekuasaan seorang penguasa di Jawa. Menurutnya kepercayaan benda-benda pusaka tersebut selain pembuatannya melalui proses spiritual '*laku*', benda-benda tersebut juga pemberian dari para manusia pilihan yang mempunyai *kesakten*.

Orang Jawa pada umumnya dan khususnya mereka yang masih mempunyai kaitan dengan kraton, menganggap bahwa benda-benda bekas penguasa itu mempunyai kekuatan spiritual dan dianggap sakral, karena aura pemakainya telah melekat dalam benda-benda tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari cara mereka memperlakukan benda-benda tersebut. Mereka memakai bahasa halus dan bagi benda-benda yang dianggap ampuh, mereka memberikan nama-nama dengan memakai julukan Kyai. Seumpama Kyai Gundil yang dibuat oleh Sunan Kalijaga, Kyai Plered, Kyai Baruklinting, dan lain-lain. Bahkan sepasang meriam pun, yaitu Kyai dan Nyai Setomi, buatan negeri Belanda sudah dianggap pusaka oleh kraton Surakarta (Isbodroini 2002, 146).

Mengapa pusaka dianggap mempunyai kekuatan spiritual sehingga dianggap penting? Seorang informan merupakan kepala desa Tanjung, menjelaskan bahwa

benda-benda pusaka tersebut warisan dari nenek moyang yang mempunyai kelebihan dari manusia biasa. Mereka percaya bahwa para leluhur '*mbah*'², mampu memohon kepada Allah (sebelum Islam, mereka memohon kepada para dewa) untuk memberikan kekuatan pada benda-benda pusaka tersebut. selain tombak, keris, dan kentongan dipinjami oleh seorang *pituo* dari luar daerah Kediri. Ia juga memiliki pusaka-pusaka lain seperti batu akik yang dipercaya untuk mengendalikan macan putih menjaga desa, dan payung warisan ayahnya mantan lurah untuk mengayomi warga desa. Setiap malam jumat barang pusaka tersebut harus menyediakan sesaji, dengan membakar dupa (Wawancara dengan Vito, 15 Agustus 2017).



Gambar 1. Macam-Macam Pusaka Kontestan Pilkades Tanjung

Sumber: Pusaka para calon kepala desa Pilkades Tanjung

Pembahasan fenomena tentang pusaka dimiliki calon kepala desa diatas, cukup relevan ditinjau dari perspektif kekuasaan Jawa Anderson (Budihardjo 1984. 44-45). karena bukan bagaimana menggunakan kekuasaan tetapi bagaimana mengumpulkan atau menghimpin kekuasaan. Anderson mengungkapkan kekuasaan itu homogen, semua kekuasaan sama jenisnya dan sama pula sumbernya. Segala hal yang dipercaya mempunyai kekuatan spiritual seperti berbagai barang pusaka, dikumpulkan oleh penguasa. Begitu pula dahulu bila dalam sebuah peperangan kerajaan musuh telah dapat dikalahkan, maka semua benda-benda dari raja yang ditaklukkan akan dibawa ke istana raja selaku penakluk. Yakni seperti benda-benda pusaka yaitu keris, tombak, pedang, payung kerajaan, para istri atau selir, dan lain-lainnya. Sehingga kerajaan yang telah dikalahkan dalam sesuatu peperangan, tidak dibumuhanguskan karena kepercayaan bahwa semua benda-benda itu mempunyai

² Unsur kesaktian pusaka itu merupakan substansi, maka ia bisa disimpan di dalam, atau diisi dengan suatu objek. Objek kesaktian ini diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya dan disebut sebagai pusaka. Masyarakat Jawa pedesaan cenderung masih mengenal kepercayaan mengenai benda-benda bertuah. Misalnya, keris berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa sebagai benda pusaka yang memiliki kekuatan supranatural dan harus dihormati. Oleh karena itu, benda pusaka merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan yang mendalam sehingga menimbulkan sebuah anggapan bahwa pusaka tersebut buatan empu yang mempunyai keampuhan dan kesaktian. Dengan itu, segala ritual dan mantra-mantra, menjadi pusaka memiliki daya magis hingga dikeramatkan dan menjadi benda pusaka.

kekuatan spiritual. Bagi raja pihak pemenang memiliki benda-benda spiritual tersebut akan memperbesar kekuasaannya.

Sampai di mana tradisi kepemilikan pusaka ini tetap ada, bahkan pemiliknya adalah para calon kepala desa desa, bukan merupakan rahasia lagi seperti diungkap diatas saat pemilihan kepala desa berbagai pusaka digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri para calon kepala desa atau hanya sekedar berjaga dari serangan gaib lawan politik bila terjadi perang dukun (dukun di kediri disebut *pituo* bisa berasal dari kiai atau dukun Jawa) menjelang Pilkades. Suatu ilustrasi yang menarik dari gejala ini adalah kecenderungan calon kepala desa desa memiliki benda-benda keramat kekuasaan Jawa itu

Pulung Sebagai Tanda Kekuasaan

Menurut paham Jawa *pulung* tidak dapat begitu saja diambil, melainkan harus diberi. Hal itu sering terjadi melalui semacam pengalaman panggilan; orang yang dipanggil yang barangkali sedang bersemedi di puncak gunung atau di tengah hutan (*laku tapa, lelana brata*) tiba-tiba dijatuhi wahyu ilahi, sering dalam bentuk cahaya biru berbentuk bundar yang melayang di langit dan turun diatas orang yang terpanggil (*ndaru, pulung*). Orang yang sedemikian dipenuhi oleh kekuatan adikodrati (ketiban pulung) juga berubah wajahnya; tanpa disadarinya sendiri wajahnya mulai bersinar (*teja*). *Teja* itu kelihatan bagi rakyat, maka rakyat tahu bahwa ada muncul seorang pemimpin baru (Magnis Suzeno 2003, 103).

Eksistensi sumber kekuasaan Jawa '*pulung*', juga terjadi dalam dinamika pemilihan kepala desa Tanjung. Karena usaha meraih kekuasaan harus didahului dengan mendapatkan wahyu. Sehingga calon kepala desa berusaha keras secara spiritual yaitu dengan melakukan *laku* dan *tapa brata* yang sungguh-sungguh. Berdasarkan pengakuan kepala desa terpilih melakukan *tapa brata* (untuk mendapatkan pulung) terbagi menjadi dua bentuk yakni ritual Islam dan ritual kejawen. Ritual Islam adalah ibadah di tempat ibadah (musholla dan Masjid), mulai dari sholat malam, puasa, dzikir, dan doa sampai menjelang pagi. Ia mengaku suatu malam ketika menjalankan ibadah dzikir tiba-tiba di luar musholla muncul cahaya terang (merah) dan kilat. Hal ini menambah keyakinan para pendukung (saat itu begadang) bahwa *pulung* sudah muncul, jadi potensi menang dalam pemilihan nanti sangat besar. Selain itu, usaha untuk memperoleh pulung tidak hanya dengan ritual keagamaan. Karena informan tersebut juga menjalankan semedi, untuk mendapatkan *pulung* tersebut, atau tanda kekuasaan bertempat di Petilasan Joyoboyo dan Sendang Tirta Kamandhanu (Wawancara dengan Vito, 15 Agustus 2017).

Sebaliknya penafsiran berbeda tentang pulung oleh mantan kepala desa yang kalah dalam Pilkades kemarin Tahun 2016. Menurutnya pada saat Pilkades Tanjung kemarin tidak ada *pulung* yang keluar (apabila tidak ada tanda kekuasaan berpindah seharusnya pihak incumbent yang tetap berkuasa di desa Tanjung). Bahkan, keluarga Vito yang merupakan lawan politik pemenang Pilkades yang lalu, mengakui tidak ada *pulung* yang keluar saat begadang malam menjelang pemilihan. Setelah Pilkades Tanjung, ia mencoba bertanya kepada seorang ulama yang menginformasikan "sebenarnya ini belum keluar atau beralih tapi dipaksakan pulung untuk keluar" (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2017).

Kekalahan mantan kepala desa dalam Pilkades Tanjung, menurut kekuasaan Jawa merupakan kegagalan untuk memusatkan kekuatan kosmis dalam dirinya sendiri, begitu pula seorang raja dapat kehilangan kekuasaan apabila ia kehilangan

kemampuan pemerintahan itu. Tanda bahwa kekuasaannya mulai ambrol ialah kekacauan-kekacauan, pemberontakan-pemberontakan, rasa tidak puas dalam rakyat, kebejatan moral yang semakin merajalela, serta bencana-bencana alam dan panen yang gagal (Magnis Suzeno 2003, 107). Salah satu keluhan rakyat desa Tanjung, yang tidak puas terhadap sang mantan Kades adalah kesulitan mencari kepala desa saat ada keperluan di balai desa. Salah satu penyebabnya adalah ia bukan termasuk lurah *tulen*, karena merangkap sebagai penguasa yang sering berpergian ke luar kota (jual-beli mobil Jakarta). Ditinjau dari perspektif kekuasaan Jawa, kejatuhan penguasa akibat wahyu meninggalkan penguasa ketika beliau tutup usia – atau ketika tampak keruntuhannya – dan beralih kepada mereka yang terpilih sebagai pemimpin baru (Moertono 1985, 68).

Petungan Sistem Penanggalan Jawa

Salah satu tradisi yang masih ada di Indonesia yaitu sistem penanggalan Jawa, atau biasa disebut primbon. Keahlian mengenai sistem penanggalan Jawa ini sering pula diterapkan dalam penentuan hari baik dan buruk. Misalnya, untuk penentuan waktu mendirikan rumah, untuk memulai usaha (memulai bercocok tanam di pedesaan), untuk acara perkawinan, dan pula untuk mengetahui karakter seseorang berdasar hari kelahiran dan pasaran (*weton*). Kepercayaan masyarakat Jawa yang mayoritas masih mempercayai dan meyakini primbon, membuat tradisi ini masih ada di kalangan masyarakat. Pada umumnya semua kegiatan masyarakat Jawa masih berpegang pada suatu hukum adat, yang mengakibatkan sebuah tradisi mengenai penanggalan Jawa masih digunakan di masyarakat Jawa khususnya di daerah pedesaan.

Primbom merupakan pegangan orang Jawa, karena upacara khitanan dan perkawinan – seperti juga pergantian tempat tinggal semacamnya – tampaknya perlu ditetapkan dengan kehendak manusia; tetapi disini pun penetapan secara sembarangan harus dihindari dan suatu tatanan ontologis yang lebih luas ditetapkan dengan sistem ramalan numerologi yang disebut *petungan* atau hitungan. Sebagaimana dalam suatu harmoni, hubungan yang paling tepat adalah terpastikan, tertentu, dan bisa diketahui. Demikian pula agama, seperti suatu harmoni, adalah pada akhirnya suatu ilmu, tak peduli betapapun praktek aktualnya mungkin lebih mendekati suatu seni. Sistem *petungan* memberikan suatu jalan untuk menyatakan hubungan ini dan dengan demikian menyesuaikan perbuatan seseorang dengan sistem itu. *Petungan* merupakan cara untuk menghindarkan semacam disharmoni dengan tatanan umum alam yang hanya akan membawa ketidakuntungan (Gertz 1981, 38-39).

Keyakinan terhadap kesakralan sistem hitungan Jawa dalam kehidupan masyarakat desa Tanjung, tidak hanya berdampak pada kehidupan individu tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial. Hal itu menyangkut aktifitas yang berhubungan dengan kepentingan umum seperti pemilihan kepala desa. Karena ketiga calon kepala desa menggunakan hitungan Jawa saat Pilkades yang lalu. Kepala desa terpilih mengaku punya orang sendiri untuk proses *petungan* Jawa di daerah Blitar. Sosok konsultan spiritual tersebut sudah sejak zaman dahulu (zaman Mubarok mantan lurah Tanjung dan juga orang tuanya) terkenal sebagai ahli penanggalan Jawa. Jadi waktu pemilihan kepala desa ternyata secara hitungan Jawa, hari pencoblosan atau kemenangannya sama dengan hari *weton* waktu almarhum bapaknya dulu juga terpilih menjadi kepala desa yakni Rabu *Pahing* (Wawancara dengan Vito, 15 Agustus 2017).

Secara umum penggunaan sistem hitungan jawa ‘*petungan*’ dalam menghadapi pemilihan kepala desa itu merupakan warisan tradisi Jawa yang masih sejalan dengan prinsip kekuasaan spiritual Jawa. Karena *petungan* Jawa merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendapatkan kesalamatan dan meramalkan kehidupan (untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meramalkan kebaikan) dalam menghadapi peristiwa penting seperti pemilihan kepala desa (desa Sitimerto dan desa Tanjung), namun menyerahkan hasilnya kepada Tuhan atau dalam Islam adalah Allah SWT.

Luri Garis Keturunan Kepala Desa

Tradisi kekuasaan Jawa yang masih bertahan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kediri, biasanya para calon kepala desa adalah mereka yang secara *trah* memiliki hubungan dengan pendiri atau kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat desa bahwa jabatan kepala desa adalah menurut garis tangan keturunan keluarga kepala desa sebelumnya. Fenomena ini yang biasa disebut “*luri*” dalam tradisi politik kekeluargaan tersebut. Budaya lokal di Kediri merupakan warisan dari peninggalan kerajaan Kediri yang masih berpengaruh sampai saat ini. Penyelenggarahan politik dan pemerintahan desa dipegang oleh para bangsawan yang bergelar “*luri*”. Para bangsawan memainkan perannya sebagai patron dengan memilihara hubungan dengan kliennya (masyarakat desa).

Silsilah dalam faham kekuasaan Jawa merupakan salah satu hal yang penting bagi legitimasi seorang penguasa. Sebagai contoh umpamanya, adalah bahwa dinasti Mataram berasal dari petani atau rakyat kebanyakan. Nenek moyang raja-raja Mataram adalah Ki Ageng Sela. Ia adalah pemuka pedukuhan di desa Sela. Babad menggambarkan bahwa ia adalah seorang yang rajin dalam bertani dan kuat dalam melakukan tapanya maka keturunannya dapat menjadi orang-orang besar karena wahyu yang didapat Ki Ageng Sela telah melahirkan para leluhur raja-raja Mataram. Bahkan senapati dapat menguasai laut selatan akibat dari tapanya. Untuk mengokohkan legitimasi kekuasaannya, selain melalui wahyu, raja-raja Mataram membuat silsilah dengan mengaitkan mereka dengan para leluhur dari orang-orang besar agar tercipta gambaran *training kusumo rembesing madu, wijining atapa, thedaking andana warih*, agar rakyat desa mengakui kekuasaan pemimpinnya (Moertono 1985, 62).

Salah satu anggota luri yang sekarang kepala desa Tanjung mengatakan bahwa, “aku sama adit (kepala desa sitimerto) itu masih satu *mbah* (leluhur atau nenek moyang) yang dulu kepala desa, jadi kita merupakan keturunan lurah” (Wawancara dengan Vito, 15 Agustus 2017). Ketika penulis mengkonfirmasi ke kepala desa Sitimerto, ia juga membenarkan pernyataan tersebut. Legitimasi keturunan luri merupakan salah satu strategi politik calon kepala desa Tanjung untuk merebut suara pemilih. Bahkan di desa tempat peneliti lahir (Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri) terdapat dua golongan *luri* yang masih saudara kandung saling bertarung di Pilkades.

Dari penjelasan diatas status sosial sebagai anggota kelompok *luri* masih sangat berpengaruh untuk legitimasi seorang penguasa di pedesaan Jawa. Secara keseluruhan informan menyampaikan bahwa pada dasarnya, status *luri* adalah faktor untuk meningkatka keterpilihan para kandidat bertarung kepala desa dimana leluhur dilahirkan, efeknya akan meningkatkan kepercayaan diri *luri* tersebut walaupun terkadang harus bertarung dengan sesama *luri* yang masih saudara kandung di satu desa. Dari aspek teoritik kekuasaan seorang *luri* menggunakan

kekuatan karisma terwariskan secara simbolik kepada keturunan-keturunannya. Model otoritas karismatik Weber, menjadi modal yang paling signifikan tereproduksi secara politik dalam bentuk legitimasi penguasa terhadap masyarakat desa (Adam Kuper dan Jessica Kuper 2000, 286). Jadi silsilah golongan luri adalah cara lain untuk meningkatkan kemegahan penguasa adalah silsilah penguasa, makin banyak tokoh-tokoh besar, nyata ataupun legendaris, termasuk dalam suatu silsilah, dan makin panjang silsilahnya, makin besar pula martabat penguasa (Moertono 1985, 74).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, interpretasi dan pembahasan penelitian, yakni hasil kajian strategi politik berbasis budaya Jawa. Maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.

1. Dalam kontestasi politik desa penggunaan sumber daya kekuasaan yang efektif bergantung kepada kepemilikan sumber-sumber kekuasaan material dan spiritual. Para calon kepala desa perlu memiliki kedua sumber daya kekuasaan tersebut (sumber daya material dan sumber daya spiritual). Lantas, menggunakan kedua sumber daya kekuasaan secara efektif untuk strategi pemenangan di pesta demokrasi pedesaan.
2. Kekayaan memang merupakan salah satu syarat bagi seorang pemimpin desa Tanjung, tetapi bukan satu-satunya sumber kekuasaan dan bahkan bukan faktor dominan. Misalnya, kepala desa terpilih di Tanjung justru pemberian paling kecil (tiga puluh ribu rupiah per orang) dan mengaku tidak punya modal uang sama sekali menjelang Pilkades. Ia lebih cenderung mempraktikan '*laku*' bersifat kekuasaan spiritual Jawa daripada dengan cara membeli suara '*nuku*' pemilih desa. Dengan kasus itu, calon kepala desa pedesaan Jawa perlu memperhatikan sumber kekuasaan Jawa yang identik Sifat sakti '*kesakten*' bersifat kekuasaan spiritual
3. Simbol kekuasaan Jawa bersifat kekuasaan spiritual yang dijadikan strategi politik dalam pemilihan kepala desa Tanjung terbagi menjadi tujuh kategori: *pertama*, upacara *Slametan* di makam pendiri desa. *Kedua*, jasa *pitou* berasal dari kiai dan dukun. *Ketiga*, kepemilikan benda-benda pusaka. *Keempat*, pulung sebagai tanda kekuasaan. *Kelima*, *petungan* sistem penanggalan Jawa. *Keenam*, *luri* garis keturunan kepala desa.

SARAN

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian beberapa saran penting terkait penggunaan strategi politik berbasis budaya Jawa di Pilkades Tanjung antara lain; sesuai dengan hasil simpulan bahwa figur personal kontestan mampu mempengaruhi pemilih desa sehingga masyarakat desa lebih memilih calon kepala desa yang mempunyai rekam jejak baik dan program-program pembangunan desa. Dengan demikian para calon kepala desa diharapkan tidak hanya mengandalkan uang untuk membeli suara pemilih desa, dan berdampak buruk bagi pembangunan demokrasi di tingkat desa. Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap penggunaan politik uang dalam pesta demokrasi di pedesaan, sehingga kontestasi politik desa bisa berjalan lebih harmonis dan damai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ditjen Risbang Kemenristekdikti atas dana hibah yang diberikan dalam nomor kontrak: 12/KP/LPPM-UWP/K-I/III/2019 tanggal 27 Maret 2019. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Wijaya Putra.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, Benedict R.O'G. *Kuasa-Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (terj). Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000
- Aspinall, Edward and Noor Rohman, *Village Head Election in Java: Money Politics and Brokerage in The Remaking of Indonesia's Rural Elite*. Journal of Southeast Asian Studies, 48(1), pp 31-52 February 2017
- Bodgan, Robert dan Steven J. Taylor. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986
- Cahyono, Heru. *Konflik Elite Politik di Pedesaan: Relasi antara Badan Perwakilan Desa dan Pemerintahan Desa*, Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol 2, No 1, 2005
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Edisi 14, 2014
- Geertz, Clifford C. (1981) *Abangan, santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Terjemahan oleh Aswab Mahasin), Jakarta: Pustaka Jaya, 1981
- Hatma Indra, Pajar. *Hubungan Raja dan rakyat di Tengah Gelombang Demokrasi: Studi Tentang Keberlangsungan Konsep Kekuasaan Jawa di Masyarakat Yogyakarta Tahun 1998-2011*. Yogyakarta: Disertasi Departemen Sosiologi UGM, 2013.
- Kuncoro, Bambang. "Hubungan Desa dan Negara: Studi Relasi Kekuasaan Kepala Desa dan Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pasca Orde Baru". Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2014 Miles,
- Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, USA: SAGE, 1994
- Moertono, Soemarsaid. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, Jakarta: Cornell Modern Indonesia Project (terjemahan Yayasan Obor Indonesia), 1985
- Magnis Suzeno, Franz, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Pito,TA, *Mengenal Teori-Teori Ilmu Politik*, Jakarta, 2005
- Pribadi, Yanwar. *The Klebun, The Kiai and The Blater: Note from western Madura, Indonesia*. Journal South East Asia Research, 23,3, pp 303-317 doi: 10.5367//sear.2015.0267
- Schroder, Peter. *Strategi Politik (Terjemahan)*, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit- Indonesia), 2010
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Tambunan, Elizabeth. *Perubahan Elit Lokal di dalam Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Pasca Pemekaran Tahun 2003*. Tesis, Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2007

Yani Yuningsih, Neneng. dan Valina Singka Subekti, *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*". Jurnal Politik, Vol 1, No. 2, Februari2016

Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2003

Wawancara Vito Calon Kepala Desa Tanjung

Wawancara Agus Calon Kepala Desa Tanjung

Wawancara Rudi Calon Kepala Desa Tanjung

Wawancara Satirin Ketua DPMPD Kabupaten Kediri

Internet:

www.sabdalandit.wordpress.com/tag/wreddotomo

www.nu.or.id

<https://kbbi.web.id>